

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENUNJANG PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(Suatu Studi di Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara)**

*Jenifer Lanto<sup>1</sup>  
Arpi Rondonuwu<sup>2</sup>  
Josef Kairupan<sup>3</sup>*

**Abstrak**

Program raskin (program penyaluran beras untuk keluarga miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Penyaluran raskin (beras untuk rumah tangga miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang difokuskan pada peran pemerintah desa menunjang Kebijakan Program Raskin di Desa Bawoleu dilihat dari aspek keberhasilan pelaksanaan program Raskin, yang meliputi : tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. Informan dalam penelitian ini adalah Aparat Pemerintah Desa dan pengurus serta anggota BPD dan masyarakat (KK). Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan kunci juga dilakukan pengumpulan data-data statistic di kantor desa, dengan mengadakan uraian secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian di Desa Bawoleu Kecamatan Tagulanadang Utara. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program Raskin di Desa Bawoleu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menemui kendala pendataan yang tidak terdata dengan baik, lokasi geografis yang letak Desanya berjauhan yang sulit dijangkau, dan keadaan sumber daya aparat pelaksana di tingkat Desa yang perlu lebih diberdayakan serta perilaku pemimpin yang bersifat subyektif dalam penentuan penerima manfaat dari program raskin.

**Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Kesejahteraan Masyarakat.**

<sup>1</sup>*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

<sup>2</sup>*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

<sup>3</sup>*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

## **Pendahuluan**

Program raskin menjadi salah satu parameter untuk mengetahui tingkat ekonomi suatu Daerah dan kesejahteraan Masyarakat. Program ini dilaksanakan melibatkan Instansi terkait, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Desa Bawoleu yang akan menjadi lokasi penelitian ini merupakan desa yang cukup strategis dimana masyarakatnya telah cenderung mengarah pada masyarakat pengembangan di Wilayah Kabupaten SITARO. Namun hal ini tidak menjamin tidak adanya permasalahan mengenai kesejahteraan atau kemiskinan, itulah sebabnya Desa Bawoleu tetap menjadi target peningkatan kesejahteraan antara lain melalui penyaluran beras miskin (raskin) dan juga melalui peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan. Suatu permasalahan dalam penyaluran program raskin yang dilakukan pemerintah Desa Bawoleu pun tidak luput dari berbagai persoalan yang disebabkan oleh kelalaian para aparat Desa Bawoleu sehingga harapan/tujuan pencapaian program penyaluran beras miskin (raskin) atau belum efektif.

Pemerintah Desa Bawoleu merupakan perangkat yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Untuk aparat pemerintah desa Bawoleu sebagai pemberi pelayanan dituntut untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta memiliki sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial, profesionalisme dan komitmen yang tinggi agar dapat menjamin tercapainya tujuan

pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peranan kinerja aparat pemerintah desa Bawoleu dalam penyaluran Beras Miskin, juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan, inilah yang menjadi fokus penelitian, apakah telah dilaksanakan sesuai prosedur ataukah dilaksanakan secara kondisional di lapangan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berkeinginan untuk mengadakan penelitian tentang peranan pemerintah desa dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara.

## **Tinjauan Pustaka**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1989:667) kata peranan mengandung arti, bagian tugas utama yang harus dilakukan. Kemudian menurut Purwadarminta (1989:735) arti kata peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama (dalam hal terjadinya suatu hal dan peristiwa). Menurut Miftha Thoha (1995:11) peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena jabatan tertentu, atau adanya suatu kantor yang dikenal pengertian ini lebih ditentukan dengan jabatan tertentu serta dengan adanya satu kantor. Menurut Soerjono Soekanto (1989:146) peranan adalah aspek dinamis dari status. Peranan ini selanjutnya berwujud kegiatan yang merupakan suatu fungsi kepemimpinan yang berusaha melaksanakan atau menyaksikan sesuatu yang menjadi kepentingan bersama.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1:2 UU No. 6 Tahun 2014). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. (Pasal 1:3 UU No. 6 Tahun 2014).

Tingkat kepuasan dari kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat di rumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : (1) rasa aman (security), (2) kesejahteraan (welfare), (3) kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (identity) Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
3. Tingkat pendidikan keluarga;
4. Tingkat kesejahteraan keluarga, dan;

5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Kebijakan program raskin untuk masyarakat miskin (dalam hal ini keluarga prasejahtera) untuk meningkatkan kesejahteraan/ taraf hidup masyarakat.

### **Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang difokuskan pada peran pemerintah desa menunjang Kebijakan Program Raskin di Desa Bawoleu dilihat dari aspek keberhasilan pelaksanaan program Raskin, yang meliputi : tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi.

Informan dalam penelitian ini adalah Aparat Pemerintah Desa dan pengurus serta anggota BPD dan masyarakat (KK). Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan kunci juga dilakukan pengumpulan data-data statistic di kantor desa, dengan mengadakan uraian secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian di Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pelaksanaan program Raskin di Desa Bawoleu terlihat bahwa dari informan dari pihak perangkat Desa dan perangkat pemerintah Desa; mengatakan bahwa pelaksanaan program Raskin adalah baik dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan pangan dari penerima manfaat program raskin, karena tepat waktu penerimaan dan harga yang sesuai dengan rencana waktu dan ketentuan harga, walaupun masyarakat masih mengkonsumsi sesuai dengan

kebutuhan makanan pokok masyarakat yaitu sagu, dan umbi-umbian sesuai dengan budaya masyarakat.

Selain itu secara keseluruhan dalam pelaksanaan program Raskin di Desa Bawoleu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menemui kendala pendataan yang tidak terdata dengan baik, lokasi geografis yang letak Desanya berjauhan yang sulit dijangkau, dan keadaan sumber daya aparat pelaksana di tingkat Desa yang perlu lebih diberdayakan serta perilaku pemimpin yang bersifat subjektif dalam penentuan penerima manfaat dari program raskin. Dalam Pengelolaan Raskin di Kepala Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara, Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Desa. Tim Koordinasi Raskin Desa adalah pelaksana Program Raskin di Desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Tujuan pelaksanaan Program Raskin berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sedangkan sasaran Program RASKIN Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di titik distribusi. Kebijakan Program Raskin di Desa Bawoleu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Bawoleu masih

menemui berbagai kendala hal ini dapat dilihat dari hasil capaian yang baru mencapai lebih-kurang 48,9 %. Kurangnya capaian hasil pelaksanaan program raskin disebabkan karena berbagai hal antara lain budaya yang tetap mempertahankan makanan saku, ubi sebagai makanan pokok warga sehingga kurang menerima beras yang merupakan jatah raskin, pendataan yang tidak terdata dengan baik dimana ada sebagian masyarakat sebenarnya tergolong miskin tetapi tidak mengakui untuk dimasukan sebagai penerima program raskin, lokasi geografis yang letak Desanya berjauhan yang sulit dijangkau, dan keadaan sumber daya aparat pelaksana di tingkat Desa yang perlu lebih diberdayakan serta perilaku pemimpin yang bersifat subjektif dalam penentuan penerima manfaat dari program raskin. Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dalam pelaksanaan Kebijakan Program Raskin di Desa Bawoleu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Bawoleu yaitu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Desa serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas tim Koordinasi Raskin Desa masih menemui kendala-kendala hal ini berkaitan dengan keadaan sumber daya aparat yang rendah, keadaan wilayah geografis dan tingkat pemahaman masyarakat yang pendidikannya relatif rendah. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam pembenahannya.

Dalam pelaksanaan Distribusi Raskin di Desa, Kepala Desa yang menjadi penanggung jawab sebagai pelaksana Distribusi Raskin di Desa

adalah Kepala Desa dengan membentuk pelaksana distribusi Raskin tingkat Desa. Hal ini sering menemui berbagai kendala kepada pelaksana distribusi Raskin tingkat Desa yang kurang memahami tujuan pelaksanaan program beras miskin untuk meningkatkan Taraf hidup masyarakat terhadap kondisi kehidupan ekonomi keluarga prasejahtera sebagai penerima manfaat program raskin. Pelaksanaan program raskin di Desa berkaitan dengan ukuran keberhasilan pelaksanaan program Raskin, yang meliputi: tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. Dari hasil penelitian bahwa 11 orang informan yang mengatakan bahwa pelaksanaan program Raskin adalah kurang tepat sasaran bahkan tidak tepat sasaran, karena jatah beras untuk program Raskin diberikan kepada keluarga yang mempunyai kedekatan dengan perangkat pemerintah Desa atau Desa yang ekonominya tidak tergolong orang yang kurang mampu. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa pelaksanaan program Raskin berkaitan tepat jumlah terlihat bahwa umumnya mengatakan tepat jumlah sehingga tidak menemui kendala, hal ini terjadi karena budaya masyarakat yang lebih mengutamakan sagu, dan ubi sebagai makanan pokok warga. Dalam pelaksanaan hasil penelitian mengatakan bahwa pelaksanaan program Raskin berkaitan tepat harga terlihat bahwa 16 orang penerima program Raskin mengatakan tidak tepat harga karena ada biaya penambahan angkutan dari petugas di Desa dalam mendistribusikan beras yang menjadi Jatah pada program beras untuk keluarga penerima manfaat. Dalam pelaksanaan program

Raskin berkaitan dengan tepat waktu berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program Raskin berkaitan tepat waktu terlihat bahwa sering tidak tepat waktu karena lokasi distribusi yang sukar dijangkau oleh tim distribusi. Sedangkan administrasi pelaksanaan program Raskin terlihat bahwa sering tidak tepat administrasi karena keadaan sumber daya manusia pelaksanan di tingkat Desa yang masih rendah. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program Raskin di Desa Bawoleu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menemui kendala pendataan yang tidak terdata dengan baik dimana ada sebagian masyarakat sebenarnya tergolong miskin tetapi tidak mengakui untuk dimasukan sebagai penerima program raskin, lokasi geografis yang letak Desanya berjauhan yang sulit dijangkau, dan keadaan sumber daya aparat pelaksana di tingkat Desa yang perlu lebih diberdayakan serta perilaku pemimpin yang bersifat subyektif dalam penentuan penerima manfaat dari program raskin.

### **Kesimpulan**

1. Sesuai hasil penelitian bahwa dalam pengelolaan Raskin di Desa Bawoleu Kecamatan Tagulandang Utara dilaksanakan sesuai dengan kebijakan\aturan yang berlaku. Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Desa. Tim Koordinasi Raskin Desa adalah pelaksana Program Raskin di Desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
2. Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dalam pelaksanaan Kebijakan Program

Raskin di Desa Bawoleu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Bawoleu yaitu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Desa serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas tim Koordinasi Raskin Desa masih menemui kendala-kendala hal ini berkaitan dengan keadaan sumber daya aparat yang rendah, keadaan wilayah geografis dan tingkat pemahaman masyarakat yang pendidikannya relatif rendah.

3. Dalam pelaksanaan distribusi Raskin di Desa, Kepala Desa yang menjadi penanggung jawab sebagai pelaksana distribusi Raskin di Desa dengan membentuk pelaksana distribusi Raskin tingkat Desa. Hal ini sering menemui berbagai kendala kepada pelaksana distribusi Raskin tingkat Desa yang kurang memahami tujuan pelaksanaan program beras miskin untuk meningkatkan Taraf hidup masyarakat terhadap kondisi kehidupan ekonomi keluarga prasejahtera sebagai penerima manfaat program raskin.
4. Pelaksanaan program raskin di Desa berkaitan dengan ukuran keberhasilan pelaksanaan program Raskin, yang meliputi : tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi.
5. Dari hasil penelitian bahwa 11 orang informan yang mengatakan bahwa pelaksanaan program Raskin adalah kurang tepat sasaran bahkan tidak tepat sasaran tidak tepat sasaran karena jatah beras untuk program Raskin diberikan kepada keluarga yang mempunyai kedekatan dengan perangkat pemerintah Desa atau

Desa yang ekonominya tidak tergolong orang yang kurang mampu.

6. Dalam pelaksanaan hasil penelitian mengatakan bahwa pelaksanaan program raskin berkaitan tepat harga terlihat bahwa 16 orang penerima program raskin mengatakan tidak tepat harga karena ada biaya penambahan angkutan dari petugas di Desa dalam mendistribusikan beras yang menjadi jatah pada program beras untuk keluarga penerima manfaat.
7. Dalam pelaksanaan program Raskin berkaitan dengan tepat waktu berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program Raskin berkaitan tepat waktu terlihat bahwa sering tidak tepat waktu karena lokasi distribusi yang sukar dijangkau oleh tim distribusi. Sedangkan administrasi pelaksanaan program Raskin terlihat bahwa sering tidak tepat administrasi karena keadaan sumber daya manusia pelaksanaan di tingkat Desa yang masih rendah.
8. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program Raskin di Desa Bawoleu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menemui kendala pendataan yang tidak terdata dengan baik dimana ada sebagian masyarakat sebenarnya tergolong miskin tetapi tidak mengakui untuk dimasukan sebagai penerima program raskin, lokasi geografis yang letak Desanya berjauhan yang sulit dijangkau, dan keadaan sumber daya aparat pelaksana di tingkat Desa yang perlu lebih diberdayakan serta perilaku pemimpin yang bersifat subyektif dalam penentuan penerima manfaat dari program raskin.

## Saran

1. Diharapkan pemerintah atau institusi yang berkepentingan penanganan program raskin untuk dapat lebih mempersiapkan aparat yang bertugas untuk penanganan program raskin dan lebih mengsosialisasikan kebijakan program raskin kepada masyarakat penerima manfaat program raskin.
2. Dalam pendistribusian raskin diharapkan pemerintah mempertimbangkan dari segi keadaan letak geografis dari wilayah distribusi raskin.
3. Pemerintah perlu mempertimbangkan bahan makanan yang didistribusikan sesuai dengan budaya lokal masyarakat yang menjadi bahan pangan setempat.
4. Masyarakat harus memberikan partisipasi dalam mengawasi petugas yang menangani pelaksanaan kebijakan program raskin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., 1997, *Prosedur Pengertian*, Bandung : Rineka Cipta.
- Bareint S., 1996. *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Binarto dan Surastopo Hadisumarno. 1979. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3ES.
- Kairundin M., 1992. *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty.
- Koentjaningrat, 1980. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Munandar Soelaeman., 1998. *Sosiologi Dasar*, Bandung: Ratika Aditama.
- Moleong, L., 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasikun, 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Nawawi, H. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: UGM Press.
- Pamudji, S., 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Purwadarminta, W.J.S. 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Saparin S., 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto Soerjono, 1990 *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Thoha Miftha., 1995. *Kepemimpinan dalam Manajemen Satu Tindakan Prilaku*, Jakarta: P.T. Eraja Grafindo Persada.
- Verger K. J., 1981. *Sosiologi Pengetahuan*, Manado: FISIP Unsrat.